

Analisis Sistem kurikulum Tingkat Pusat dan Daerah: Studi Observasi Pada Satuan Pendidikan Jenjang SMA Kecamatan Padang Utara

Adillah Naryawati^{1*}, Julia Salsabila², Dwi Damayanti³, Novriza⁴, M. Rayhan Pangestu⁵, Dwi Rahmiyana Febriana⁶, Ahmad Sabandi⁷, Hade Afriansyah⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸ Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 30 Mei 2025

Direvisi pada tanggal 10 Juni 2025

Diterima pada tanggal 22 Juni 2025

Terbit online pada tanggal 30 September 2025

Kata kunci:

Implementasi Kurikulum, Kebijakan Pendidikan, Kurikulum Merdeka, KOSP



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem implementasi kurikulum tingkat pusat dan daerah pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan fokus pada praktik yang diterapkan di SMA Negeri 8 Padang. Masalah utama dalam kajian ini adalah kesenjangan antara perumusan kebijakan kurikulum oleh pemerintah pusat dengan pelaksanaannya di tingkat sekolah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, hingga satuan pendidikan. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) disusun berdasarkan kebijakan nasional, namun disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal. Proses ini mencerminkan integrasi antara pendekatan top-down dan bottom-up dalam manajemen kurikulum. Sekolah diberikan ruang otonomi untuk menyusun dan menyesuaikan kurikulumnya, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman guru, sumber daya terbatas, serta perlunya pelatihan dan koordinasi berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum sangat bergantung pada kolaborasi antarpihak dan penguatan kapasitas satuan pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dan kontekstual.

Penulis Korespondensi:

Adillah Naryawati

Email: naryawatiadillah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks nasional, kurikulum berperan sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. Pendidikan nasional memiliki peran sentral dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mempersiapkan generasi yang kompeten, berkepribadian, dan mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai instrumen utama dalam proses pembelajaran, kurikulum menjadi landasan operasional yang menentukan arah dan muatan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Di Indonesia, pengelolaan kurikulum dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan tujuan menjamin standar mutu pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Namun, di sisi lain, satuan pendidikan juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan

kurikulum operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Kurikulum Merdeka.

Sistem Kurikulum Merdeka di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024. Kurikulum ini bertujuan untuk memperkuat capaian pembelajaran berbasis kompetensi inti, memberikan kebebasan kepada guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan konteks lokal, serta mengintegrasikan literasi digital dan karakter dalam setiap mata pelajaran. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun ajaran 2024/2025, dengan penekanan pada asesmen autentik, proyek kolaboratif, dan evaluasi berbasis portofolio sebagai wujud implementasi pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Implementasi pengelolaan kurikulum tingkat pusat di satuan pendidikan tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan. Mulai dari kesenjangan pemahaman kebijakan antara regulator dan pelaksana di lapangan, keterbatasan sarana-prasarana, hingga variasi kapasitas guru dalam mengadaptasi perubahan kurikulum. SMAN 8 Padang, sebagai salah satu sekolah unggulan di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, menjadi contoh menarik untuk dikaji lebih dalam terkait bagaimana sebuah satuan pendidikan jenjang SMA mengimplementasikan kebijakan kurikulum pusat dalam praktik nyata. Sekolah ini telah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan berbagai inovasi, sekaligus menghadapi kendala-kendala teknis dan non-teknis yang mungkin juga dialami oleh sekolah lain di Indonesia.

Persepsi masyarakat yang menganggap beban kurikulum baru sebagai peningkatan tekanan belajar juga mengurangi dukungan stakeholder, khususnya orang tua, dalam mendukung kegiatan literasi dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan kerangka sistem Kurikulum Merdeka tingkat pusat pada jenjang SMA; (2) Mengidentifikasi kesenjangan nyata antara kebijakan pusat dan praktik implementasi di lapangan; dan (3) Merumuskan rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan untuk memperkuat pelaksanaan Kurikulum Merdeka agar selaras dengan tujuan nasional dan kebutuhan lokal.

SMAN 8 Padang dipilih sebagai lokus penelitian bukan hanya karena statusnya sebagai sekolah favorit, tetapi juga karena representasinya sebagai satuan pendidikan yang aktif dalam program-program pengembangan kurikulum nasional. Sekolah ini telah menjadi salah satu pelopor dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di wilayah Sumatera Barat, sehingga pengalamannya dapat menjadi cerminan bagi sekolah-sekolah lain yang berada dalam fase transisi. Melalui pendekatan observasi langsung, penelitian ini berupaya mengungkap praktik-praktik baik (*best practices*) yang telah dilakukan sekolah, sekaligus mengidentifikasi titik-titik kritis yang memerlukan intervensi lebih lanjut dari pemangku kebijakan.

Namun, observasi di berbagai SMA menunjukkan adanya variasi signifikan dalam pelaksanaan kurikulum ini. Hal ini disebabkan oleh kesiapan kompetensi guru dalam merancang dan menilai pembelajaran, serta kapabilitas manajerial sekolah dalam mengelola silabus dan bahan ajar. Beberapa studi mengungkapkan bahwa pelatihan guru masih terpusat pada teori dengan praktik lapangan yang terbatas, sehingga aspek penilaian autentik belum optimal diadopsi. Selain itu, koordinasi antara pusat dan sekolah dalam penyusunan muatan lokal belum merata, sehingga muatan karakter dan keunikan daerah seringkali kurang terrepresentasi dalam rencana pembelajaran.

Jenis Artikel

Artikel ini termasuk dalam jenis artikel hasil penelitian lapangan yang menggunakan metode observasi langsung. Penelitian dilakukan di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di wilayah Kecamatan Koto Tangah. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data faktual dan mendalam mengenai kondisi di lapangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam artikel. Dalam penyusunannya, artikel ini tidak hanya mengandalkan hasil temuan observasi, tetapi juga diperkuat oleh kajian pustaka dari berbagai sumber terpercaya. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, buku-buku akademik, serta dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan menggabungkan data empiris dari lapangan dan referensi teoritis dari berbagai literatur, artikel ini.

2. KAJIAN TEORI

Konsep Kurikulum Pendidikan

Kurikulum merupakan konsep penting dalam dunia pendidikan yang memiliki berbagai penafsiran dari para ahli pengembang kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin *curriculae*, yang berarti lintasan atau jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Makna ini kemudian

diadaptasi dalam konteks pendidikan sebagai rangkaian proses pembelajaran yang harus dilalui oleh peserta didik untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kelulusan dan perolehan ijazah. Dalam sebuah kurikulum, yang diatur bukan hanya kumpulan materi pengetahuan yang harus diajarkan oleh guru kepada siswa. Kurikulum juga mencakup berbagai aktivitas pendidikan lain yang dianggap penting karena dapat memengaruhi perkembangan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Dalam praktiknya, kurikulum dapat dipahami dalam tiga sudut pandang utama. Pertama, kurikulum sebagai isi atau materi pelajaran, yaitu sekumpulan mata pelajaran seperti Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lainnya yang harus dikuasai siswa untuk mendapatkan pengetahuan dasar. Kedua, kurikulum sebagai rencana pembelajaran yang mencakup seluruh program dan fasilitas pendidikan yang disediakan sekolah guna menunjang proses belajar, seperti sarana pembelajaran, perpustakaan, dan lingkungan sekolah yang mendukung. Ketiga, kurikulum dipandang sebagai pengalaman belajar, yaitu semua aktivitas yang memberikan pengalaman pendidikan kepada siswa, baik yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas (Evi Catur Sari, 2022).

Dengan demikian, kurikulum memiliki peran sentral dalam proses tumbuh kembang peserta didik dan pembentukan lingkungan belajar yang efektif. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, diperlukan landasan yang kuat agar pengembangan kurikulum di Indonesia benar-benar dapat dijadikan acuan yang kokoh bagi seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Tujuan Kurikulum Pusat dan Daerah

Tujuan dari kurikulum pusat yang dirancang oleh pemerintah pusat menitikberatkan pada penetapan standar pendidikan nasional yang konsisten dan menyeluruh. Fokus utama kurikulum pusat adalah mengembangkan kompetensi abad ke-21, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan penguasaan teknologi digital yang semakin penting di era modern. Selain itu, tujuan dari kurikulum pusat adalah untuk menjamin bahwa seluruh peserta didik memperoleh pendidikan yang setara dalam hal kualitas, isi, dan kompetensi dasar yang harus dikuasai, tanpa tergantung pada lokasi geografis atau kondisi sosial-ekonomi mereka. Pemerintah pusat biasanya menetapkan struktur kurikulum, standar kompetensi, dan indikator pencapaian, sedangkan implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing sekolah. Kurikulum ini juga bertujuan untuk memastikan pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia agar setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Pernyataan ini didasarkan pada kebijakan dan arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, yang secara resmi memperkenalkan Kurikulum 2025 dengan pendekatan pembelajaran *deep learning* yang mengedepankan pemahaman mendalam dan pengalaman belajar yang bermakna (Guru Berdaya, 2025; Kemdikbud, 2025).

Tujuan kurikulum di tingkat daerah lebih menekankan pada fleksibilitas dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Kurikulum daerah memberikan ruang bagi sekolah dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan muatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik budaya, sosial, dan ekonomi setempat. Pendekatan ini bertujuan agar proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan lingkungan sekitar peserta didik. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kemendikbudristek, serta ditekankan kembali oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebagai upaya agar kurikulum di daerah dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan sesuai dengan kondisi lokal (Guru Berdaya, 2025; Kemdikbud, 2025)

Kebijakan Kurikulum Tingkat Pusat dan Daerah

Kurikulum pusat atau kurikulum nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kurikulum ini dirancang untuk menjadi standar nasional pendidikan yang harus diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di suatu negara guna memastikan kesetaraan dan mutu pendidikan di berbagai daerah.

Sistem kurikulum tingkat pusat di Kota Padang di dasarkan pada: Dasar hukum terbaru yang mengatur sistem kurikulum tingkat pusat di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Peraturan ini menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional yang berlaku mulai tahun ajaran 2024/2025, menggantikan Kurikulum 2013 secara bertahap.

Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Padang menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kerangka nasional, dan setiap sekolah wajib memilih "Merdeka Belajar Episode" (misalnya: *Project Based Learning*, *Microcredential*, *Leerlabs*) yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Adapun langkah pelaksanaannya, yaitu: 1) Membuka forum musyawarah sekolah untuk menentukan episode

Merdeka Belajar yang akan diadopsi tiap tahun ajaran, 2) Menyusun rencana implementasi episode, lengkap dengan jadwal, sumber daya, dan indikator keberhasilan.

Selain Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024, beberapa regulasi lain yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan kebijakan: setiap satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP di Kota Padang wajib menyusun dan menerapkan perencanaan pembelajaran yang selaras dengan tujuan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Langkah Pelaksanaan:
 - 1) Menetapkan visi-misi sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan profil pelajar Pancasila.
 - 2) Mengadaptasi kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam RPP dengan penekanan pada pembelajaran karakter
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Dengan kebijakan: satuan pendidikan wajib memastikan setiap aspek standar nasional (kompetensi lulusan, proses, isi, penilaian, tenaga pendidik, sarana-prasarana, pembiayaan, dan pengelolaan) diadaptasi ke dalam Kurikulum Merdeka, sehingga mutu layanan pendidikan dapat terjamin dan terukur. Langkah Pelaksanaan:
 - 1) Membentuk tim internal sekolah untuk melakukan audit mutu tahunan, berlandaskan standar nasional.
 - 2) Menyusun laporan capaian standar (misalnya persentase lulusan mencapai profil pelajar Pancasila).
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Dengan kebijakan: Pengembangan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di setiap jenjang harus mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan yang memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek dan masalah (project/problem-based learning). Langkah Pelaksanaan:
 - 1) Melakukan workshop guru untuk menerjemahkan SKL ke dalam indikator pencapaian pembelajaran Harian/Mingguan.
 - 2) Melakukan penilaian autentik (portofolio, presentasi, dan produk proyek) sebagai bagian dari evaluasi SKL.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Dengan kebijakan: Materi pembelajaran wajib memuat muatan lokal (kearifan Minangkabau, seni, bahasa daerah) dan nilai-nilai keislaman yang relevan, diintegrasikan ke dalam tema-tema Kurikulum Merdeka secara lintas mata pelajaran. Langkah Pelaksanaan:
 - 1) Menyusun Modul Muatan Lokal yang dikembangkan bekerja sama dengan budayawan dan ulama setempat.
 - 2) Mengadakan ujicoba tematik selama satu semester, lalu memetakan efektivitas integrasi muatan lokal dan keislaman
- e. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka. Dengan kebijakan: Pengukuran capaian pembelajaran dilakukan menggunakan rubrik dan instrumen terstandar yang ditetapkan BSKA, dilengkapi data portofolio siswa, dan dilaporkan secara berkala ke Dinas Pendidikan. Langkah Pelaksanaan:
 - 1) Melatih guru dalam penggunaan rubrik BSKA untuk penilaian kognitif, psikomotorik, dan afektif.
 - 2) Menyusun jadwal penilaian formatif dan sumatif sepanjang semester, serta menyampaikan hasilnya dalam rapor digital

Kurikulum daerah adalah bagian dari kurikulum nasional yang dikembangkan oleh pemerintah daerah atau satuan pendidikan untuk menyesuaikan isi dan proses pembelajaran dengan karakteristik lokal, kebutuhan peserta didik, serta potensi wilayah tertentu. Kurikulum ini merupakan bentuk desentralisasi pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menyusun materi yang kontekstual dan

relevan dengan lingkungan sekitar. Depdiknas (2006) menyatakan bahwa kurikulum daerah adalah bagian dari struktur kurikulum nasional yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri sesuai dengan ciri khas dan keunggulan lokal. Tujuan kurikulum daerah adalah: 1) Mengembangkan potensi lokal sebagai sumber belajar, 2) Menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap lingkungan dan budaya daerah, 3) Memberikan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Sesuai juga dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kurikulum Lokal Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar.

Implementasi Kurikulum Pusat dan Daerah: Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan di Indonesia menekankan pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem pendidikan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di setiap wilayah. ofiani et al. (2024) menyatakan bahwa desentralisasi pendidikan telah menghasilkan dampak positif, misalnya peningkatan partisipasi siswa, pemberdayaan pemerintah daerah, serta adaptasi kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) muncul sebagai bagian dari desentralisasi, di mana sekolah dan masyarakat diberikan wewenang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Penerapan MBS disebut mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, dan memungkinkan pengelolaan yang lebih fokus di tingkat sekolah. Dengan otonomi ini, daerah dapat menyesuaikan kebijakan pendidikan dan kurikulum dengan karakteristik lokal (misalnya budaya dan potensi daerah).

Kurikulum nasional Indonesia menetapkan kerangka dasar dan kompetensi inti yang harus dicapai, namun memberi ruang bagi daerah untuk menyusun muatan lokal. Kurikulum lokal dirancang untuk melestarikan identitas dan budaya daerah sehingga peserta didik dapat mengembangkan keunikan lokal. Selaras dengan ini, penelitian menunjukkan kurikulum muatan lokal yang baik dapat meningkatkan kemampuan praktis siswa, terutama keterampilan vokasional dan ekonomi. Misalnya, Setiawan et al. (2023) melaporkan bahwa implementasi kurikulum lokal di jenjang SMK berhasil meningkatkan keterampilan vokasional dan mengurangi angka putus sekolah siswa kurang mampu. Dengan demikian, kebijakan nasional memberi payung umum, sementara pemerintah daerah memanfaatkan otonomi untuk mengembangkan konten lokal yang kontekstual.

Dalam praktiknya, kebijakan kurikulum nasional disusun oleh pemerintah pusat (misalnya Kementerian Pendidikan) dan kemudian diimplementasikan hingga ke sekolah-sekolah. Pemerintah daerah berperan menetapkan muatan lokal dan memfasilitasi pelaksanaan kurikulum sesuai kewenangannya. Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah menuntut pemberian panduan yang jelas dan dukungan teknis agar kurikulum nasional dan lokal dapat berjalan sinergis. Dalam kerangka ini, penguatan pelatihan guru, peningkatan koordinasi antar tingkat pemerintahan, dan pemantauan terstruktur menjadi hal penting agar tujuan peningkatan mutu pendidikan tercapai.

Meskipun membawa manfaat, implementasi kurikulum yang desentralistik menghadapi berbagai kendala. Sofiani et al. (2024) mencatat tantangan seperti disparitas kualitas pendidikan antar daerah, keterbatasan tenaga pendidik terlatih, serta birokrasi yang rumit. Nasihah (2023) menambahkan bahwa hambatan implementasi sering berupa perselisihan tafsir kebijakan, kurangnya dukungan sumber daya manusia, pemahaman masyarakat yang belum merata, dan sosialisasi kebijakan yang belum optimal. Di tingkat sekolah, keberhasilan MBS juga tergantung pada kapasitas sekolah untuk mengelola sumber daya secara mandiri serta partisipasi pemangku kepentingan sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut, strategi yang disarankan antara lain peningkatan pelatihan guru dan pengelola sekolah, sosialisasi kebijakan secara komprehensif, serta kolaborasi yang aktif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Kajian teori menyimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi perlu disertai upaya penguatan kompetensi daerah dan mekanisme evaluasi yang responsif. Dengan demikian, implikasi praktisnya adalah perlunya penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal serta dukungan berkesinambungan untuk peningkatan mutu pendidikan.

3. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan sistem kurikulum tingkat pusat dan daerah di satuan pendidikan jenjang SMA. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk meneliti fenomena pendidikan dalam kondisi nyata, tanpa manipulasi, serta memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika yang terjadi secara kontekstual. Seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2019), penelitian kualitatif dilakukan untuk meneliti objek dalam keadaan

alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama, serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di SMAN 8 Padang, yang dipilih secara purposive karena dianggap representatif dalam menerapkan kebijakan kurikulum pusat dan daerah secara bersamaan.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan, yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual dan mendalam terhadap realitas yang ada. Selain itu, artikel ini diperkuat dengan kajian pustaka dari berbagai sumber ilmiah yang kredibel, termasuk jurnal-jurnal akademik, buku-buku referensi, serta dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan menggabungkan data empiris dari hasil observasi dan teori dari literatur yang relevan, artikel ini berupaya menyajikan analisis yang komprehensif dan bermakna.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

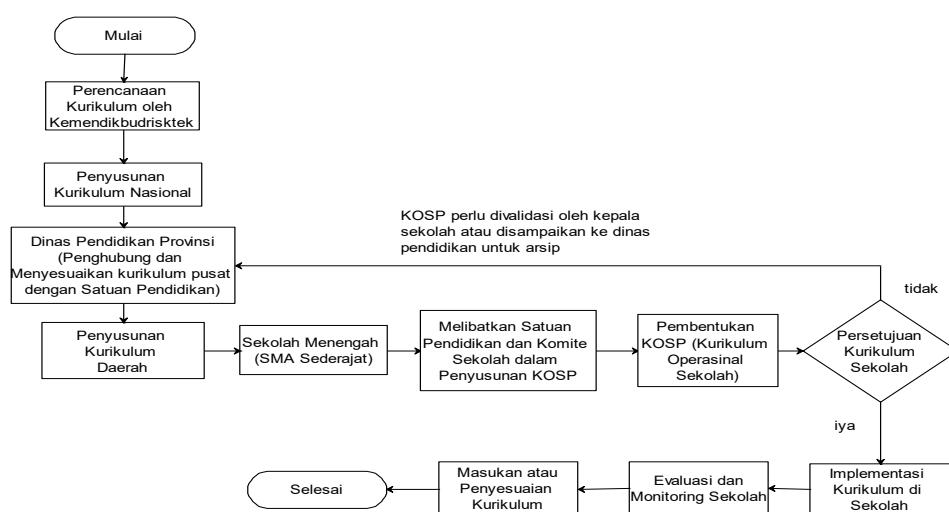
Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan di SMA Negeri 8 Padang, diperoleh informasi mengenai sistem implementasi kurikulum yang diterapkan mulai dari tingkat pusat hingga ke satuan pendidikan. Proses ini dimulai dari perencanaan kurikulum oleh Kemendikbudristek yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kurikulum nasional. Selanjutnya, kurikulum nasional diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi yang berperan sebagai penghubung dan penyesuai antara kebijakan kurikulum pusat dengan kebutuhan satuan pendidikan di daerah.

Setelah itu, dilakukan penyusunan kurikulum daerah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan di tingkat sekolah menengah (SMA/ sederajat). Di tingkat sekolah, proses implementasi kurikulum melibatkan partisipasi aktif dari satuan pendidikan dan komite sekolah dalam penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). KOSP yang telah disusun kemudian perlu divalidasi oleh kepala sekolah atau disampaikan kepada dinas pendidikan sebagai arsip. Proses selanjutnya adalah penilaian atau persetujuan kurikulum oleh pihak terkait. Apabila disetujui, maka kurikulum dapat langsung diimplementasikan di sekolah. Namun, jika tidak disetujui, maka perlu dilakukan revisi dan penyesuaian kembali terhadap KOSP.

Setelah implementasi, dilakukan evaluasi dan monitoring oleh pihak sekolah guna mengkaji efektivitas pelaksanaan kurikulum yang telah berjalan. Hasil dari evaluasi ini menjadi bahan untuk penyusunan kembali atau penyesuaian kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks sekolah. Proses ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu siklus berkelanjutan yang menekankan partisipasi berbagai pihak dan penyesuaian terhadap dinamika pendidikan. Temuan ini mencerminkan bahwa SMA Negeri 8 Padang menerapkan sistem implementasi kurikulum secara terstruktur, kolaboratif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Adapun alur dari implementasi sistem kurikulum tingkat pusat dan daerah hingga implementasinya ke satuan pendidikan yang telah dijelaskan, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Implementasi Kurikulum tingkat Pusat dan Daerah hingga Satuan Pendidikan

Implementasi di SMA Negeri Kec Padang Utara mencakup berbagai aspek, termasuk supervisi akademik untuk meningkatkan kinerja guru dan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar. Penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan penting dalam mendukung pengembangan profesional guru dan adaptasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

- a. Penerapan Kurikulum Merdeka
 - 1) Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa.
 - 2) Implementasi dilakukan melalui pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan guru dan siswa, serta observasi kelas untuk memahami dinamika pembelajaran.
 - 3) Penelitian menunjukkan peningkatan keterlibatan siswa dalam proses belajar, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif.
- b. Tantangan yang Dihadapi
 - 1) Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal materi ajar maupun fasilitas, menjadi kendala dalam pelaksanaan kurikulum.
 - 2) Masih terdapat perbedaan pemahaman di antara guru mengenai konsep Kurikulum Merdeka, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengajaran.
- c. Dukungan dan Pelatihan
 - 1) Diperlukan program pelatihan yang berkelanjutan untuk guru agar mereka dapat mengimplementasikan kurikulum dengan lebih efektif.

Pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberhasilan implementasi kurikulum.

Pembahasan

Temuan dari hasil observasi dan wawancara di SMA Negeri 8 Padang menunjukkan bahwa implementasi kurikulum berjalan dalam suatu mekanisme sistematis dan berjenjang. Proses dimulai dari perumusan kurikulum oleh pemerintah pusat (Kemendikbudristek), yang kemudian disesuaikan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sebelum diimplementasikan oleh satuan pendidikan dalam bentuk Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). Hal ini sejalan dengan pandangan Depdiknas (2006) yang menegaskan bahwa kurikulum memiliki struktur nasional dan dapat dikembangkan secara lokal sesuai kebutuhan dan potensi daerah.

Keterlibatan aktif pihak sekolah dan komite dalam penyusunan KOSP mencerminkan prinsip *bottom-up planning*, yang penting dalam pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Teori ini menekankan desentralisasi kewenangan pendidikan kepada sekolah untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi kurikulum (Sulistiyo & Purnomo, 2019). Widodo & Wong (2021) juga menekankan bahwa pelibatan pemangku kepentingan lokal dalam implementasi kurikulum mendukung tercapainya pendidikan yang lebih kontekstual dan adaptif.

Selanjutnya, evaluasi dan validasi internal yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pihak dinas pendidikan menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan lokal. Ini konsisten dengan pandangan Mustafa & Shakir (2020) yang menyatakan bahwa dalam sistem pendidikan terdesentralisasi, koordinasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk menjaga konsistensi mutu pendidikan nasional.

Kurikulum Merdeka yang diterapkan di SMA Negeri 8 Padang menunjukkan pendekatan fleksibel dan kontekstual, dengan adanya integrasi proyek, asesmen autentik, dan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila. Hal ini mendukung pernyataan Sucipto et al. (2023) bahwa reformasi kurikulum saat ini mengarah pada pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi dan kontekstual. Adapun proses penyusunan dan revisi KOSP di sekolah ini menunjukkan bahwa kurikulum diperlakukan sebagai proses dinamis, bukan produk final, sebagaimana ditegaskan dalam literatur oleh Irmawan et al. (2023).

Namun demikian, beberapa tantangan masih ditemukan di lapangan, antara lain keterbatasan pemahaman guru tentang Kurikulum Merdeka, kurangnya pelatihan yang aplikatif, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Temuan ini sejalan dengan Nasihah (2023) yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka masih menghadapi hambatan struktural dan operasional, terutama di aspek pengembangan profesional guru.

Secara keseluruhan, model implementasi kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 8 Padang telah mencerminkan integrasi antara kebijakan nasional dan praktik lokal. Ini menunjukkan keberhasilan pendekatan desentralisasi pendidikan yang memungkinkan sekolah menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sosial budaya mereka (Sofiani et al., 2024). Untuk memperkuat capaian implementasi ini, dibutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah dalam bentuk pelatihan berkelanjutan, penyediaan sumber daya, dan monitoring yang

adaptif terhadap dinamika di lapangan. implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 8 Padang ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun sistem pendidikan yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik di masa depan.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem kurikulum dari tingkat pusat hingga ke satuan pendidikan di SMA Negeri 8 Padang dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terkoordinasi. Proses dimulai dari perencanaan oleh pemerintah pusat, penyesuaian oleh Dinas Pendidikan Provinsi, hingga penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) oleh sekolah bersama komite dan pihak terkait. Proses ini menunjukkan keterpaduan antara pendekatan *top-down* dari pemerintah dan *bottom-up* dari satuan pendidikan, yang sesuai dengan prinsip desentralisasi dan manajemen berbasis sekolah.

Kurikulum Merdeka yang diimplementasikan telah memberikan ruang bagi sekolah untuk merancang pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, disparitas pemahaman guru, dan perlunya peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah. Meskipun demikian, SMA Negeri 8 Padang telah berhasil menjadi contoh praktik baik dalam mengelola kurikulum secara kolaboratif dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kompetensi siswa.

Kurikulum Merdeka yang diterapkan bersifat fleksibel dan kontekstual, mendukung pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi. Namun, tantangan seperti keterbatasan pemahaman guru, kurangnya pelatihan aplikatif, dan sarana prasarana yang terbatas masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, model implementasi yang ada mencerminkan keberhasilan desentralisasi pendidikan, memungkinkan penyesuaian kurikulum dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sosial budaya.

Untuk memperkuat capaian implementasi, diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah, melalui pelatihan, penyediaan sumber daya, dan monitoring yang adaptif terhadap dinamika di lapangan.

Saran yang dapat diberikan: Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, disarankan untuk memperkuat pelatihan dan pendampingan teknis bagi guru serta tim kurikulum sekolah guna memperdalam pemahaman terhadap konsep Kurikulum Merdeka dan praktik implementasinya secara kontekstual. Bagi satuan pendidikan, perlu terus mengembangkan inovasi dalam penyusunan dan evaluasi KOSP dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sekolah, termasuk komite sekolah dan masyarakat, agar kurikulum benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal. Dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas studi pada satuan pendidikan di daerah lain dengan pendekatan komparatif, untuk melihat variasi implementasi kurikulum dan menemukan model-model pelaksanaan yang efektif dan adaptif terhadap karakteristik lokal.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ahmad Sabandi, M.Pd., dan Bapak Hade Afriansyah, M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Analisis Sistem, atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan artikel ini. Kontribusi dan motivasi dari beliau berdua sangat berarti dalam kelancaran penyelesaian artikel ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tim kelompok yang telah bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan observasi maupun penyusunan laporan. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak SMAN 8 Padang, khususnya kepada pimpinan sekolah dan seluruh warga sekolah yang telah memberikan izin, dukungan, serta informasi yang dibutuhkan selama proses pengumpulan data di lapangan.

7. DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. (2006). *Panduan Umum Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Dharma, I. M. A., Arnyana, I. B. P., Dantes, N., & Sudewiputri, M. P. (2023). Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11(3). <https://doi.org/10.38048/jipcb.v11i3.2004>
- Fitriyani, D., & Wibowo, S. A. (2022). Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kurikulum Nasional: Studi Kasus Kurikulum Merdeka. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, 4(2), 50–58. <https://doi.org/10.26555/jakp.v4i2.43910>
- Guru Berdaya. (2025). *Kurikulum untuk Tahun Ajaran 2025/2026*. Diakses dari <https://guruberdaya.org/kurikulum-untuk-tahun-ajaran-2025-2026/>
- Irmawan, D., Mulyadiprana, A., & Muharram, M. R. W. (2023). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak SD Negeri Pasirjeungjing. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(02), 287–301. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i02.2592>
- Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.
- Khoir, N., & Pritasari, A. C. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 2(1), 14–21. <https://doi.org/10.61116/jkip.v2i1.320>
- Lahabu, Y. D. (2024). Tantangan dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Dasar. *Al Banin: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 1(1), 69–82. <https://ejurnal.darulfatah.ac.id/index.php/albanin/article/view/448>
- Mardiana, M., & Emmiyati, E. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran: Evaluasi dan Pembaruan. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, 10(2), 121–127. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v10n2.p121-127>
- Marlia, A., Rieartika, A. V., Indriani, S., Iklimah, L., Wulandari, T., Karunia, T., & Dewi, A. S. (2023). Menelaah Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: SLR. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, 2(3). <https://doi.org/10.59024/jipa.v2i3.744>
- Masrurah, U., Rahmawati, F. P., & Ghufro, A. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Peningkatan Literasi Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4). <https://doi.org/10.23969/jp.v9i4.16906>
- Mustafa, Z., & Shakir, M. (2020). Educational Decentralization and Curriculum Autonomy: A Comparative Analysis of Southeast Asia. *International Journal of Educational Development*, 75, 102169. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102169>
- Nasihah, A. (2023). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Administrasi Pendidikan. *Journal of Educational Policy and Management*, 5(2), 857–864. <https://doi.org/10.32699/jepm.v5i2.3628>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kurikulum Lokal Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar.
- Sari, E. C. (2022). Kurikulum Di Indonesia: Tinjauan Perkembangan Kurikulum Pendidikan. *Inculco Journal of Christian Education*, 2(2), 93-109. <https://doi.org/10.59404/ijce.v2i2.54>
- Setiawan, A., Sugianto, A., & Rahmat, M. (2023). Kurikulum Muatan Lokal sebagai Strategi Peningkatan Keterampilan Vokasional Siswa SMK. *Jurnal Pendidikan dan Vokasi*, 13(1), 72–80. <https://doi.org/10.21831/jpv.v13i1.54021>
- Sofiani, A., Hakim, L., & Pratiwi, N. (2024). Desentralisasi Pendidikan dan Tantangan Implementasi Kurikulum di Sekolah Menengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 9(1), 15–29. <https://doi.org/10.21009/jmpi.v9i1.1043>

- Sucipto, S., Sukri, M., Patras, Y. E., & Novita, L. (2023). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Systematic Literature Review. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(1). <https://doi.org/10.20961/jkc.v12i1.84353>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Cet. ke-27). Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyo, U., & Purnomo, H. (2019). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Konteks Otonomi Pendidikan Daerah. *Jurnal Kependidikan*, 7(2), 162–172. <https://doi.org/10.21831/jk.v7i2.22617>
- Wafi, A. (2017). Konsep Dasar Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 133-139.
- Widodo, H. P., & Wong, W. A. (2021). Policy Implementation of Decentralized Curriculum in Indonesian Secondary Schools. *Asia Pacific Journal of Education*, 41(4), 287–300. <https://doi.org/10.1080/02188791.2021.1910123>
- Yuliana, R., & Tanuwijaya, H. (2018). Keterlibatan Pemangku Kepentingan Lokal dalam Penyusunan Kurikulum di Daerah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(3), 112–119. <https://doi.org/10.17977/um048v24i32018p112>